

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI
MELALUI JEJARING SOSIAL/INTERNET
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)**

OLEH:

**AYU ANITA SARI
B111 10 265**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI
MELALUI JEJARING SOSIAL/INTERNET
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/PID.B/2013/PN.SUNGG)**

OLEH:

**AYU ANITA SARI
B111 10 265**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL/INTERNET

(Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)

Disusun dan diajukan oleh

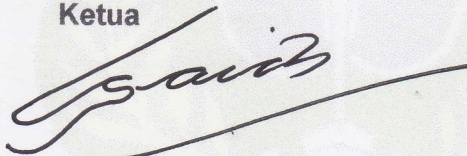
AYU ANITA SARI

B 111 10 265

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ayu Anita Sari

Nomor Induk : B111 10 265

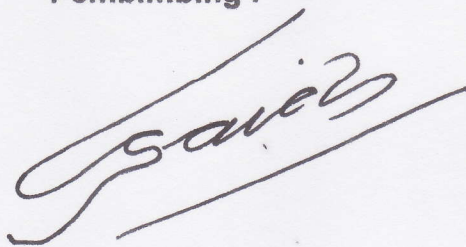
Bagian : Hukum Pidana

**Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pornografi melalui
Jejaring Sosial/Internet (Studi Kasus Perkara
Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

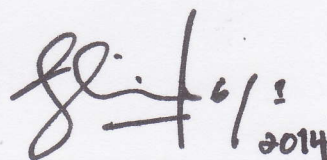
Makassar, Januari 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AYU ANITA SARI**

No. Pokok : B111 10 265

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pornografi Melalui jejaring Sosial/Internet
(Studi Kasus Perkara Pidana No.21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014



Wakil Dekan Bidang Akademik.

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AYU ANITA SARI (B111 10 265) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL/INTERNET (Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG) dibimbing oleh Bapak H. M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilengkapi studi kasus dan dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penulis memperoleh bahan dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang terkait dalam menangani kasus delik pornografi melalui jejaring sosial/internet. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum pidana materiil dalam perkara nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG dinilai penulis telah tepat, *lex specialis derogat legi generali* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka penulis berpendapat bahwa UU ITE adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Pornografi dan KUHPidana yang merupakan *lex generalis* (hukum yang umum) pada delik pornografi melalui jejaring sosial/internet. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG yang menjatuhkan pidana lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum sudah tepat karena upaya damai hanya merupakan alasan yang meringankan pidana terhadap terdakwa, pemidanaan terdakwa dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

ABSTRACT

AYU ANITA SARI (B111 10 265) REVIEW JURISDICTION OVER THE OFFENSE DELICT PORNOGRAPHY THROUGH SOCIAL NETWORK / INTERNET (A Case Study of Verdict No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)
led by Mr. H. M. Said Karim as Supervisor I and Mrs. Hijrah Adhyanti as Supervisor II.

This study aims to determine the application of substantive criminal law against delict pornography offenses through social networking / internet in Verdict No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG and legal reasoning of judges in imposing criminal offense against delict pornography through social networking / internet in Verdict No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

This research includes the study of law with the normative juridical approach incorporating legislation and case studies carried out in the region Gowa in South Sulawesi, namely the District Court Sungguminasa. The author obtained the material by analyzing the case of the verdict and take the data from the relevant literature, books as well as laws and regulations relating to the issue, and take data take data directly from a court verdict in the form of interviews to the Judge handling the case delict pornography offense through social networking / internet. The materials are then processed and analyzed by descriptive qualitative.

The results suggest the application of substantive criminal law in verdict No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG assessed author has correct, *lex derogat legi generali* listed in Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code is the principle of interpretation of the law which states that the law of a special nature (*lex*) override the general law (*lex generalis*), the authors argue that the ITE Law is *lex* (the law specifically) of the Law on Pornography and Criminal Code which is a *lex generalis* (common law) on offense pornography through networking social / internet. In addition, the *legal considerations in the decision No. judge. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG* who dropped criminal charges to be lighter than the prosecutor is correct because only peace effort is the reason that mitigates against criminal defendants, sentencing the defendant intended to correct the attitude or behavior of prisoners and to prevent other people of the possibility of doing similar actions.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial Internet (Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.)”**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, adapun kekurangan dan ketidak sempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini agar mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ibunda **Hj. Andi Syamsurya, S.E.** dan Ayahanda **Ir. Sabri Rahim** atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga

kepada Saudara-saudaraku Anggun Angreany S., S.E. dan Anugrah Agung Sahputra serta seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO, beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh jajarannya;
3. Ketua bagian Hukum Pidana Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. dan sekretaris bagian Ibu Nur Azisa, S.H., M.H.;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Tim

Penguji juga Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H. M.H., Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji Pengganti dalam pelaksanaan ujian, baik proposal maupun skripsi Penulis. Terima kasih atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini;

6. Ibu Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih yang sebesar besarnya Penulis haturkan atas waktu dan tuntunannya.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;
8. Pengelola Perpustakaan Pusat Unhas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas terkhusus ibu Nurhidayah, S.Hum. dan kak Afiah Mukhtar, S.Pd. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, para Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Bapak Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, S.H., M.H., Bapak Purwanto S. Abdullah, S.H., dan Ibu Ernawati Anwar, S.H., staf Pengadilan Negeri Sungguminasa Ibu Hernawati, S.H. dan Bapak Abdul Latief,

S.H, serta para narasumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini;

10. Saudara Sidiq dan juga Ibunya yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

11. Teman-teman Provide Legal, Ayu, Shinta, Adi, Mima, Oya, Muti, Ani, Yuyun, Arif, Ary, Aso', Salam, dan masih banyak lagi, terima kasih atas kebersamaannya dalam berbagi canda tawa dari awal perkuliahan hingga saat ini;

12. Para wanita autis, Fatma, Yuni, Yunita, dan Nur, penulis sangat berterima kasih atas kebersamaan dan kegilaannya selama ini;

13. Sahabat-sahabat tercinta, Vita, Sani, Linda, dan Eka, terima kasih atas dukungan dan ketulusan kalian;

14. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH-UH), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM FH-UH) dan seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Terima kasih atas kerjasamanya;

15. Teman-teman Angkatan 2010 (LEGITIMASI) FH-UH yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan;

16. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 85 Unhas khususnya Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Alya,

17. Masyarakat Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali
Mandar, terkhusus keluarga kecil penulis saat KKN, yaitu Pak
Wage, Mae', Pijar, Elsa, dan Elma, terima kasih sebanyak-
banyaknya telah memberikan kebersamaan dan kenangan yang
tak terlupakan;

18. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu
yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan
pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, Penulis haturkan
terima kasih.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan
masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan
skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada
penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	7
B. Pengertian dan Unsur-unsur Delik.....	8
1. Pengertian Delik	9
2. Unsur-unsur Delik	12
C. Pornografi	15
1. Pengertian Pornografi	15
2. Delik Pornografi sebagai Delik Kesusilaan	21
D. Internet dan Jejaring Sosial	22
E. Regulasi Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam KUHPidana & Peraturan Perundang-undangan.	26
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)	26
2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	31
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman....	33
1. Pertimbangan Yuridis	33
2. Pertimbangan Sosiologis	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan	40
E. Teknik Analisis Bahan	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet Pada Perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG	42
1. Posisi Kasus	44
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	46
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
4. Amar Putusan	53
5. Analisis Penulis	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG..	60
1. Pertimbangan Hukum Hakim	61
2. Analisis Penulis	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	xiii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN	xvi
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan majunya peradaban, ilmu pengetahuan pun kian berkembang mengikuti perkembangan masyarakat di dunia. Begitu pula dengan teknologi informasi (*information technology*), didorong oleh globalisasi menjadikan teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut Agus Rahardjo (Budi Suhariyanto, 2012: 1) teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.

Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah sampai pada lingkup rumah tangga. Bahkan di beberapa negara, internet mengalami

booming. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Hasil penelitian *Yahoo* dan *TNS (Taylor Nelson Sofres)* disebutkan bahwa pengakses internet terbesar di Indonesia ialah mereka yang berumur 15–19 tahun sebanyak 64% (<http://edukasi.kompas.com>, diakses pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013, pukul 12.53 Wita). Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia adalah orang-orang yang melek internet. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna internet, seperti mengirim dan menerima *e-mail*, *chatting* atau mengobrol lewat Internet, dan yang paling sering dilakukan adalah membuka situs-situs Internet, terutama situs-situs jejaring sosial (*social networking*). Beberapa jejaring sosial yang saat ini dikenali yakni *Facebook*, *Twitter*, *Friendster*, *MySpace*, *Koprol*, dsb.

Banyaknya orang yang mengakses jejaring sosial ini tentu menunjukkan betapa dibutuhkannya aplikasi atau pun fitur-fitur dari situs jejaring sosial ini. Berikut merupakan beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan situs jejaring sosial antara lain: (<http://sutiati.blogspot.com>, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, pukul 20.17 Wita).

1. Mempelopori Gerakan Reformasi dan Revolusi;

Adanya situs jejaring sosial membuat masyarakat memiliki kemudahan untuk menyampaikan dan menghimpun pendapat

sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat.

2. Menjadikan Orang Lebih Percaya Diri;

Menurut sebuah penelitian, pengguna jejaring sosial memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada yang tidak, hal ini disebabkan para pengguna jejaring sosial sering mengupload foto-foto yang bergitu narsis dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

3. Mempermudah Komunikasi;

Para pengguna situs jejaring sosial tidak perlu saling bertatap muka untuk berkomunikasi, karena jejaring sosial merupakan media komunikasi canggih yang hanya memerlukan internet sebagai penghubungnya.

4. Mempermudah Menyampaikan Informasi;

Jejaring sosial merupakan situs yang paling sering diakses oleh pengguna internet, hal ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya saling bertukar atau menyampaikan informasi melalui jejaring sosial.

5. Mendapatkan Uang dari Bisnis *Online*;

Dengan jejaring sosial, penggunanya juga bisa mendapatkan uang dengan cara menjadi publisher di *revtw*, sebab *revtw* akan membayar per klik dari *link* yang anda promosikan dari *tweet* yang dipublikasikan.

6. Mempelajari Bahasa Asing;

Dengan menggunakan jejaring sosial, secara tidak langsung penggunaannya akan mempelajari bahasa asing sebab jejaring sosial bersifat internasional.

7. Berekspresi Sebebas-bebasnya.

Pengguna jejaring sosial tentu memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapat, tapi menyampaikan pendapat secara sopan dan berekspresi dengan sopan dan bertanggung jawab juga tentunya.

Jejaring sosial seharusnya menjadi media komunikasi dan hal-hal berdampak positif lainnya seperti manfaat-manfaat yang telah penulis kemukakan diatas, namun pada kenyataannya selain memiliki dampak positif penggunaan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak dari penyalahgunaan situs jejaring sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan, mulai dari penipuan, pornografi, penculikan, bahkan pemerkosaan. Seperti kasus yang akan penulis teliti yakni adanya penggunaan dari jejaring sosial yang menyangkut pornografi. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pemotretan dengan korban (pacar terdakwa) setelah melakukan hubungan badan, lalu kemudian terdakwa kembali memotret korban yang sedang mandi tanpa busana. Suatu ketika terdakwa bertengkar dengan korban dan faktor itulah yang menyebabkan terdakwa mengunggah atau meng-*upload* kedua foto korban tersebut ke

internet dalam hal ini situs jejaring sosial yaitu *facebook* tanpa seizin korban.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet (Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya, yang berkaitan dengan delik pornografi melalui internet.
2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan melalui internet (*cybercrime*) mengenai pornografi, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pornografi melalui internet.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam menganalisis delik pornografi melalui internet yang terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Sebelum penulis membahas masalah delik pornografi melalui jejaring sosial/internet, ada baiknya penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna dari tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, melihat penerapan hukum tersebut. Tinjauan yuridis dalam hal ini berarti Hukum Pidana Materiil.

Hukum pidana materiil menurut Simons (Moeljatno, 2002: 7) adalah isi atau substansi dari hukum pidana, karena hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *Strafbaar feit* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat *Strafbaarheid* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; hukum pidana materiil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Menurut van Hattum (Lamintang, 1997: 10), Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang dapat dijatuhkan

terhadap orang tersebut. Disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan:

1. Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana;
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Delik

Sebelum penulis memaparkan tentang delik menurut para ahli, maka terlebih dahulu melihat istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana yaitu delik yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*", yang di dalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak terdapat penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1991: 219).

1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana Belanda, delik dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang menggunakan istilah *delict* yang berasal dari *delictum*. Sementara hukum pidana Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dalam hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *strafbaarfeit* yang diterjemahkan menjadi perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, tindak pidana, dan ada pula yang menggunakan istilah delik.

Ada pula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986: 53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Pengertian dari delik menurut Achmad Ali (2002: 251) adalah:

Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.

Lanjut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 2010: 224) mengartikan:

Strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 2010: 225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Selanjutnya A.Z. Abidin Farid (2010: 230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut A.Z. Abidin Farid (2010: 231), istilah deliklah yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan istilah lain untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dstnya);
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disamping itu, istilah delik lebih dikenal dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kamus umum Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang

melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2. Unsur-unsur Delik

Pada umumnya, setiap delik atau tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 1997: 193). Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari delik atau tindak pidana adalah:

(Lamintang, 1997: 193)

- a. Kesengajaan (*dolus*), misalnya yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP mengenai melanggar kesusilaan, Pasal 333 KUHP mengenai merampas kemerdekaan, dan lain-lain;
- b. Kealpaan (*culpa*), misalnya seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai menyebabkan kematian;
- c. Niat atau maksud (*voornemen*) yang terdapat dalam percobaan (*poging*);
- d. Mempunyai macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- e. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- f. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu delik atau tindak pidana itu adalah:

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa-bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan (Leden Marpaung, 2009: 10).

Menurut Adami Chazawi (2010: 82), dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", juga mencantumkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang (KUHPidana). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Terjadi perbedaan pendapat jika membahas unsur-unsur dari suatu delik atau tindak pidana. Perbedaan ini pada dasarnya dilatarbelakangi

dari adanya pandangan atau aliran ilmu hukum pidana yang dianut oleh para ahli, yakni aliran monisme (monistis) dan aliran dualisme (dualistis).

Aliran monisme sebagai aliran klasik membagi unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Mencocoki rumusan delik;
- b. Adanya sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda;
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* atau *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf;
- d. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan aliran monisme tentang delik tersebut adalah menyatukan dan tidak memisahkan unsur-unsur delik tentang unsur objektif dan unsur subjektif (Adami Chazawi, 2010: 75).

Aliran monisme berpendapat bahwa jika ada delik, maka disitu ada orang yang harus dipidana, ini berarti semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Namun aliran ini mempertegas bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik yang terjadi, dengan kata lain jika ada delik, maka disitu ada *strafbaar person*, tanpa itu tidak ada delik atau tindak pidana. Aliran monisme ini dipelopori oleh Simons, van Hattum, dan van Hamel.

Sedangkan aliran dualisme atau disebut juga aliran modern, unsur-unsur delik adalah dipisahkan antara unsur pembuat dan unsur perbuatan (Adami Chazawi, 2010: 75), yang masing-masing mempunyai unsur tersendiri yaitu:

- a. Unsur Perbuatan;
 - 1) Mencocoki rumusan delik
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- b. Unsur Pembuat.
 - 1) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* dan *culpa*)
 - 2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran dualisme memisahkan unsur delik dimaksudkan untuk mensistimatisir tentang syarat-syarat pemidanaan agar mudah diketahui unsur-unsur delik yang manakah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, kedua unsur delik tersebut sama pentingnya.

C. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Setelah penulis mengemukakan pengertian delik, maka selanjutnya akan dibahas pengertian pornografi. Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual (<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses pada hari Jumat, tanggal 15 November 2013, pukul 07.50 WITA). Secara Etimologi menurut Adami Chazawi (2005: 22), mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya

menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut: (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1991: 782)

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah:

- a. HB. Jassin (Tjipta Lesmana, 1994: 109), mengemukakan bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar;
- b. Arief Budiman (Tjipta Lesmana, 1994: 109), mengemukakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum;
- c. Neng Djubaedah (2003: 254) memberikan definisi bahwa pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media

komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari, depan, samping, atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhrim atau antar bukan muhrim, atau antar manusia dengan binatang, antar binatang atau antar manusia hidup dengan manusia yang telah meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggaman atau percumbuan, gerakan masturbasi, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, *coitus interruptus*, yang bertujuan dan atau mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan atau memuakkan dan atau memalukan bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan atau adat-istiadat setempat;

- d. Wirjono Prodjodikoro (2003: 113), mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut: (Abu Abdurrahman Nusantara, 2005: 29)

- a. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
- b. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat: Cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.

Pengertian pornografi yang bersifat luas atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu, pada tahun 2008 lahir Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merumuskan delik yang berkaitan dengan pornografi. Dalam Pasal 1 UU Pornografi tercantum pengertian pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”.

Meskipun pengertian pornografi bersifat luas atau abstrak, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling sering ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Bahwa yang dimaksud penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha.

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Namun hingga sekarang sesungguhnya belum ada pengertian yang diakui bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya, agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar individu bisa terjadi perbedaan pendapat. Misalnya, sebuah lukisan wanita setengah telanjang, menurut si pelukis bukanlah pornografi, tetapi karya seni dengan daya imajinasi tinggi. Namun bagi seorang pemuka agama lukisan tersebut jelas 100% (persen) merupakan pornografi. Contoh lain adalah

majalah "Playboy" yang berisi foto-foto dan cerita-cerita seks yang memiliki izin resmi untuk beredar di Amerika Serikat, namun hal ini akan tidak diterima di Negara Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan masyarakatnya masih mematuhi norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menolak peredaran majalah "Playboy" di Indonesia.

Sementara itu, saat ini banyak sekali media, produk, dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka-teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan *premium call*, *short message service (SMS)*, *multimedia messaging service (MMS)*, video klip musik, *video game*, *plays station*, film layar lebar, program televisi, iklan, sinetron, *compact disk (CD)*, *digital versatile disk (DVD)*, hingga situs internet.

Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti *video compact disk (VCD)*, televisi atau internet telah ada di rumah atau di kamar anak-anak. Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya *electronic mail (E-mail)*, *electronic goverment (E-goverment)*, *electronic learning (E-learning)*, *electronic banking (E-banking)*, dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga

memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi.

2. Delik Pornografi sebagai Delik Kesusilaan

Ada dua macam penempatan delik pornografi dalam peraturan undang-undang hukum pidana di berbagai negara, yaitu: (Andi Hamzah, 1987: 31)

- a. Menggabungkan delik pornografi dalam bab delik kesusilaan;
- b. Memisahkan delik pornografi dan menempatkannya secara tersendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang berlaku saat ini, sesungguhnya tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana);
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHPidana).

Dengan kata lain Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia menggabungkan delik pornografi dalam bab delik kesusilaan, sama seperti *Wetboek van Strafecht*.

R. Soesilo (1995: 204) menjelaskan bahwa “kesopanan” dapat diartikan sebagai “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengertian kesusilaan yang terdapat penjelasan KUHPidana terjemahan R. Soesilo kurang jelas, sehingga sulit dipahami.

S. R. Sianturi (1996: 26) menjelaskan pengertian kesusilaan, sebagai berikut:

“yang dimaksud kesusilaan adalah dalam arti yang bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja. Akan tetapi mempunyai kebiasaan hidup yang pantas dan berahlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat masyarakat yang bersangkutan.”

Pengertian yang diberikan oleh Sianturi ini lebih jelas, namun sulit dipahami. Akan tetapi, ada suatu titik temu dari pendapat R. Soesilo dan Sianturi, yaitu bahwa kedua pendapat itu melihat kesusilaan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan nafsu kelamin dan seksualitas.

Demikianlah KUHPidana telah menggolongkan delik pornografi sebagai delik kesusilaan, dimana permasalahan pornografi lebih dilihat sebagai persoalan moralitas.

D. Internet dan Jejaring Sosial

Internet merupakan singkatan dari *interconnection networking*. Sementara definisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, pukul 22.47 Wita).

Secara sederhana menurut Harjono (2009: 9) dalam media

pembelajaran, Internet dapat diartikan kumpulan dari beberapa komputer, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit atau melalui sambungan telepon.

Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna seluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (*provider*) internet, sehingga internet sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi.

Perkembangan teknologi *Internetwork* yang dimulai dari sejarah pendiriannya dan perkembangannya hingga saat ini benar-benar dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat itu, banyak situs jejaring sosial, promosi, *milis*, dan aplikasi-aplikasi lain bermunculan.

Seperti halnya di dunia nyata, menjalin hubungan persahabatan bisa juga dilakukan di dunia maya (internet). Bedanya, melalui internet ini tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk berjabat tangan dan menanyakan siapa namanya. Di internet, seseorang bisa berkenalan dengan siapa pun, kapan pun, latar belakang, suku bangsa yang berbeda,

bahkan antar negara dengan bahasa yang berbeda pula. Tentu saja, seperti halnya di dunia nyata, etika ketika mengajak berkenalan harus tetap dijaga. Meskipun yang diajak adalah teman lama, namun jangan sampai memaksa orang lain untuk berteman. Proses untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet) seperti itu, sering disebut *social networking* (jejaring sosial) (Jarot S. & Sudarma S., 2012: 106).

Istilah jejaring sosial ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Istilah lain dari situs jejaring sosial adalah situs pertemanan, dengan situs pertemanan ini dapat dicari dan didapatkan banyak teman jika telah terdaftar dalam situs pertemanan ini. Karena situs pertemanan ini menggunakan jaringan internet tentunya teman-teman yang didapatkan bisa dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri (Eko Priyo Utomo, 2011: 79).

Eko Priyo Utomo (2011: 81) memberikan pengertian jejaring sosial yaitu sebagai berikut :

Jejaring sosial atau terjemahan Inggrisnya adalah *social networking* yang merupakan hubungan antar individu atau organisasi yang dibentuk karena adanya kesamaan, misalnya kesamaan visi, misi, pertemanan, keturunan, suku, dan sebagainya.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka

yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial), diakses pada Hari Selasa, tanggal 10 September 2013, pukul 22.40 Wita). Dengan demikian, sebuah situs jejaring sosial adalah situs yang digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial. Selain itu situs jejaring sosial berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya.

Penggunaan situs jaringan pertemanan tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung pada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung pada orang lain dan lingkungan. Selain itu, penggunaan situs jejaring sosial tidak akan

menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya, normal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan fasilitas ini, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang tidak sehat, serta penyalahgunaan fasilitas yang tidak benar, sebab media jejaring sosial ini saat ini biasanya memiliki banyak fitur-fitur yang memudahkan masyarakat luas dapat mengakses berbagai macam informasi, baik berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Maka apabila fitur-fitur ini tidak digunakan sebagaimana semestinya, tentu menyebabkan efek negatif dan berujung pada kejahatan, dikarenakan tidak menutup kemungkinan ada saja para pihak yang memanfaatkan situs tersebut misalnya untuk kegiatan yang berbau pornografi dan tentu saja melanggar kesusilaan.

E. Regulasi Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam KUHPidana & Peraturan Perundang-undangan

Berikut merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan delik pornografi melalui internet dalam hukum positif Indonesia.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Delik kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHPidana.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303

KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHPidana);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHPidana);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHPidana);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHPidana);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHPidana (Pasal 532-547) adalah sebagai berikut:

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535 KUHPidana);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539 KUHPidana);
- c. berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544 KUHPidana);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545 KUHPidana);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHPidana);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 KUHPidana).

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: **Mendistribusikan** adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, *mailing list*. **Mentransmisikan** adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti *Handphone*, *E-mail*. **Membuat dapat Diakses** adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik (<http://ronny-hukum.blogspot.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 17 September, pukul 08.17 Wita).

Informasi elektronik memiliki definisi yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terdapatnya kalimat “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan terkait perbuatan asusila melalui media ITE. Aturan dalam Undang-Undang ini tentu berhubungan dengan delik pornografi melalui jejaring sosial/internet yang akan penulis teliti. Kemudian Pasal 45 dalam UU ITE menentukan:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksinya bersifat gabungan yang ditandai dengan kata “dan/atau”. Sedangkan mengenai batas hukuman, hanya menggunakan batasan maksimum. Penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,00.

3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 UU Pornografi memberikan pengertian bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Bahwa yang dimaksud adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha.

Melihat definisi dari pornografi di atas tentu memberikan gambaran keterikatan atau pun hubungan antara UU pornografi dengan delik pornografi melalui jejaring sosial/internet yang akan penulis teliti. Adapun pengaturan delik kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi meliputi larangan dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; dan
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Kemudian Pasal 29 UU Pornografi menentukan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan *pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Dari isi pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sanksinya bersifat gabungan yang ditandai dengan kata "dan/atau". Sedangkan mengenai batas hukuman, menggunakan batasan maksimum minimum. Penjara minimum 6 bulan dan maksimum 12 tahun. Denda minimum Rp 250.000.000,00 dan maksimum Rp 6.000.000.000,00. Apabila UU ITE dan UU Pornografi disandingkan dapat diketahui bahwa ketentuan pidana UU Pornografi lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana UU ITE.

Ketentuan Pidana UU Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran

yang dilakukan yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti (<http://hukumpedia.com>, diakses pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, pukul 23.25 Wita).

Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa:

"Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim."

Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

"pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-

Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi dari delik itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan (Adami Chazawi, 2005: 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2005: 97).

2. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Achmad Ali (2009: 200) menyatakan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, M. H. Tirtaamidjaja (1955: 174) mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu;
- g. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran

pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk.

BAB III

METODE PENELITIAN

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:

A. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet” ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

yang dilengkapi dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Dalam penelitian hukum ini penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian penulis melengkapinya dengan studi kasus yang relevan dengan hal tersebut yakni putusan nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

C. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, serta Putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

2. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.
3. Bahan non-hukum berupa bahan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui wawancara terhadap hakim yang memutus perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non-hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi (bahan hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan, membaca, dan menelaah beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan Jaksa, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan.

2. Wawancara (bahan non-hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani kasus tersebut.

E. Teknik Analisis Bahan

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet Pada Perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

Delik pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHPidana. Dalam KUHPidana juga tidak dikenal istilah pornografi. Namun, terdapat pasal KUHPidana yang bisa dikenakan untuk perbuatan mengenal delik tersebut, yaitu Pasal 282 KUHPidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp45.000,-”

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milyar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE). Dalam Pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Sementara itu, Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelarangan penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu;

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah (Pasal 29 UU Pornografi). Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG tentang sebuah kasus mengenai delik pornografi melalui jejaring sosial (internet) terungkap bahwa terdakwa pada kasus ini bernama Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia melakukan perbuatan pidana dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengenalan saksi korban Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dengan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada bulan Juli 2012.

- 3 (tiga) minggu setelah perkenalannya saksi korban ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- 2 (dua) bulan kemudian saksi korban melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi korban dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi korban menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam.
- Pada tanggal 20 Oktober 2012 saksi korban kembali lagi berhubungan badan dengan terdakwa di kamar 4c lantai 2 kos Mulia dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa memotret saksi korban yang sedang mandi tanpa busana.
- Pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/mengupload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi korban Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi korban menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi korban yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe

alias Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan, terhina, dan dicemarkan nama baiknya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM- /RT.3/Ep.1/01/2013 tertanggal 08 Januari 2013, yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut.

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita – 22.36 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret

saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses *recovery* atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates: Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang terhapus tersebut tidak recovery dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;
3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal

yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto

saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses *recovery* atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates: Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang terhapus tersebut tidak recovery dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;
3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album

foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

a t a u

Ketiga

Bahwa terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyebarkan, menyebarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju

hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses *recovery* atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates: Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang terhapus tersebut tidak recovery dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;
3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet yang dilakukan oleh terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia yang dibacakan pada persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 23 Maret 2012, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini Curve (warna putih) dengan No. imei: 3521970.04.292020.6 pin 223c6519 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card 0823465332777, dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) celana panjang jeans merk Lois No. 27, 1 (satu) buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan, dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Amar putusan hakim dalam perkara pidana No.

21/Pid.B/PN.SUNGG ini adalah:

1. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini Curve (warna putih) dengan No. imei: 3521970.04.292020.6 pin 223c6519 di dalamnya terdapat SIM Card 0823465332777, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) celana panjang jeans wana biru merk Lois No. 27, 1 (satu) buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Sedangkan bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang

diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus yang penulis bahas, Jaksa Penuntut Umum mempergunakan dakwaan alternatif sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan berguna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Namun, dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut penulis dapat dikatakan kurang tepat atau kurang sempurna sebab dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, Penuntut Umum hanya mendakwakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai dakwaan pertama dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai dakwaan kedua. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) merupakan pasal yang berisi unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, oleh karena itu menurut penulis Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendakwakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) sebagai dakwaan pertama dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) sebagai dakwaan kedua. Pasal 45 (1) UU ITE berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)" merupakan pasal yang berisi ketentuan pidana dalam UU ITE, maka tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) tanpa men-junctokan dengan pasal ketentuan pidana

yaitu Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebab pasal ketentuan pidana pada dasarnya merupakan landasan bagi seorang hakim untuk menentukan lamanya pemidanaan ketika terdakwa terbukti bersalah.

Senada dengan penulis, hakim Purwanto S. Abdullah, S. H. yang merupakan hakim anggota I dalam memutus perkara ini mengungkapkan bahwa (wawancara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013):

“Dakwaan jaksa penuntut umum harusnya dijunctokan supaya memperjelas mengenai uraian pidananya yang mana. Tapi, tidak berarti bahwa dakwaan ini menjadi kabur karena dalam undang-undang ini sudah mengatur secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa ketentuan pidana yang mengatur Pasal 27 ini berada pada Pasal 45.”

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mencermati bahwa mengenai perbuatan terdakwa yang meng-*upload* foto bugil (telanjang) korban ke jejaring sosial/internet menimbulkan kerugian (imateriil) kepada korban yakni mencemarkan nama baik korban. Sehingga menurut analisis penulis, Penuntut Umum seharusnya dapat menuntut terdakwa dengan Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terhadap perbuatan yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut berlaku Pasal 36 UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Mengenai pelanggaran terhadap perbuatan tersebut, dapat dikenakan dengan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Apabila dikaitkan kembali dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka delik pornografi melalui jejaring sosial/internet yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis telah mencocoki rumusan pasal pada dakwaan pertama. Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchthalld Islamia sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.32 Wita bertempat di Malino, Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa terdakwa telah mengunggah foto tanpa busana (bugil) saksi korban Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang melanggar kesusilaan melalui internet dalam hal ini adalah jejaring sosial *facebook*, kemudian dari keterangan saksi korban Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar membenarkan bahwa benar foto yang diunggah oleh terdakwa ke jejaring sosial *facebook* dalam keadaan bugil tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sesuai dengan unsur pasal-pasal yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim mengabulkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, hal ini didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1398/FKF/XI/2012, dan ditambah dengan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Dalam perkara ini sebenarnya terjadi persinggungan antara UU ITE dan UU Pornografi. Persinggungan peraturan perundang-undangan kadang terjadi karena adanya perbedaan konteks dan tujuan perundangan. Untuk itu menurut penulis perlu dilihat keberadaan dua Undang-Undang ini bukan merupakan kontradiksi tapi justru *'compelementary'* yaitu saling melengkapi. Dalam konteks ini, UU Pornografi terlihat lebih tegas karena secara khusus bertujuan menekan pornografi dan melindungi generasi muda. Sementara UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi seperti transaksi elektronik. Keadaan ini memberikan pilihan lebih luas kepada penegak hukum dalam upaya menindak pelaku pidana terkait. Keduanya juga saling melengkapi misalnya untuk hukum penggunaan alat bukti elektronik. Konsolidasi untuk menentukan aturan turunan menjadi mutlak diperlukan antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan kedua UU ini.

Jika melihat amar putusan, hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memutus bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang sesuai yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dalam perkara ini, foto yang diunggah oleh terdakwa melalui jejaring sosial/internet benar adalah foto yang menampilkan ketelanjangan sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah menyalahi Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi yang berbunyi "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan". Namun perlu diketahui bahwa ketentuan UU Pornografi tersebut mengatur larangan pornografi secara luas bukan semata-mata melalui internet tetapi juga pornografi yang dilakukan di muka umum, sementara pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." mengatur secara khusus mengenai penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyalahi kesusilaan.

Lex specialis derogat legi generali yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa UU ITE adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Pornografi dalam delik pornografi melalui jejaring sosial/internet. Sebab dalam perkara ini, meskipun gambar yang diunggah oleh terdakwa merupakan wujud dari pornografi, namun harus dititikberatkan pada media atau sarana informasi dan transaksi elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa adalah jejaring sosial/internet dalam hal ini facebook.

Dengan demikian bertitik tolak dari hal-hal tersebut, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah tepat. Namun tuntutan tersebut dapat lebih disempurnakan dengan menjunctokan pasal ketentuan pidananya sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) sebagai penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan

berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melahirkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adanya alat bukti yang didapat yaitu:

- a. Keterangan saksi yaitu Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar, Irma Bin M. Idris, dan Martini Binti Madapa Bin Kama;
- b. Keterangan ahli yaitu Taufan Eka Putera S, Kom.;
- c. Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 1398/FKF/XI/2012 tanggal 31 Desember

2012 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., Taufan Eka Putra, S.Kom., R. Ahmadi Hari J, S.Kom yang diketahui oleh Drs. Nursamran Subandi, M.Si.;

- d. Keterangan terdakwa yaitu Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, dan;
- e. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan. Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.Sungg adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita – 22.36 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi

Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada

hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses *recovery* atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates: Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang terhapus tersebut tidak *recovery* dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;

3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan

terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses *recovery* atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates:

Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang terhapus tersebut tidak recovery dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;

3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

a t a u

Ketiga

Bahwa terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.22 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia pada bulan Juli 2012, lalu 3 minggu kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jl. Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dua bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa di kamar 4a lantai 1 kos Mulia, lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemetretan dengan menggunakan tangan kiri, pada saat itu

saksi Jumriana menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 Oktober 2012 di kos Mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2, terdakwa memotret saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa mengunggah/meng-upload ke dunia maya/internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan dalam warna hitam dengan status "Ayooo spa yach", dan foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status "Spa yang mw main", tanpa seizin saksi korban dengan menggunakan handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 melalui akun Facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1398/FKF/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., Taufan Eka Putera, S. Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S. Kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID: 8962100146825327771) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 adalah sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185 dari handphone Blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519 imei: 35219700429202206 telah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, dengan melalui proses recovery atau memunculkan kembali file yang telah terhapus yaitu sebuah file gambar dengan format "JPG" dengan nama file "IMG001~3.JPG (File dates: Created 20/10/2012 22:43:42 dan Accessed 21/10/2012) status file adalah deleted file. Namun karena file yang

terhapus tersebut tidak recovery dengan sempurna, maka file yang terhapus tersebut telah tertimpa file lain;

3. Selanjutnya dari analisa akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthald Islamia, diperoleh informasi yang juga ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 3 buah foto porno dari korban yang telah di-upload pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dengan waktu yang berbeda-beda yaitu pukul 18.22, pukul 22.32, dan pukul 23.36 oleh tersangka ke situs facebook khususnya ke dalam album foto akun tersangka. selain itu terdapat komentar-komentar terhadap ketiga foto porno tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Djumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar;

- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang memasukkan foto saksi ke dalam media informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa melalui Zul yang memberikan No. HP saksi dengan SMS kemudian saksi janji dan 3 kemudian saksi ke Kos Mulia di Jl. Veteran Selatan melakukan hubungan badan kemudian 2 bulan kemudian berhubungan badan lagi di kamar 4a lantai 2 dan melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri dan saksi menggunakan baju hijau dan pada tanggal 20 Oktober 2012 saksi kembali berhubungan badan dengan terdakwa di kamar 4c lantai 2 dan setelah selesai berhubungan badan saksi mandi dan terdakwa memotret saksi tanpa busana.
- Bahwa benar, foto bugil yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa benar, saksi adalah korban dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi membuka akun facebook milik saksi menggunakan handphone Samsung Type S-5620 kemudian berhubung saksi berteman facebook dengan terdakwa maka saksi melihat jika terdakwa telah meng-upload foto saksi yang sedang tidak berpakaian;
- Bahwa benar, saksi telah menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak meng-upload foto milik saksi ke jejaring sosial namun terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan, terhina, dan merasa dicemarkan nama baik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Irma Bin M. Idrus;

- Bahwa saksi pernah melihat foto bugil Jumriana Dg. Kanang melalui handphone Nokia 5800 milik saksi sekitar pukul 14.00 Wita, namun saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa yang mengupload kedua foto bugil Jumriana adalah terdakwa, saksi tahu karena saksi lihat di akun facebook pada tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga terdakwa *mengupload foto telanjang tersebut.*

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

- Menimbang, bahwa terhadap saksi Pr. Irma Bin Idris, Martini Binti Madapa Bin Kama dan saksi ahli Taufan Eka Putra, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tetap tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum maka keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tahu sehingga dihadapkan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan masalah terdakwa meng-upload foto bugil Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari bulan Oktober 2012, hari dan tanggal terdakwa lupa di pinggir jalan di kota Malino Kab. Gowa sekitar jam 10.00 Wita;

- Bahwa awalnya terdakwa meng-upload kedua foto bugil Jumriana Dg. Kanang dengan menggunakan Blackberry Curve (warna putih) dengan nomor imei: 361970.04.2920220.6;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah HP Blackberry Gemini Curve warna putih yang diakui terdakwa sebagai miliknya sedangkan diperlihatkan foto diketahui terdakwa bahwa itu foto Jumriana Dg. Kanang;
 - Bahwa sebabnya sehingga terdakwa meng-upload foto korban adalah karena pada saat terdakwa bertengkar, korban Jumriana mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa orang Bugis Sinjai yang tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar;
 - Bahwa foto yang diupload terdakwa adalah benar foto yang diambil pada saat mereka berada di Kos Mulia Veteran Selatan Jl. Buludua No. 60 E Makassar;
 - Bahwa pada waktu terdakwa memotret korban awalnya tidak keberatan, nanti setelah terdakwa upload baru korban keberatan satu minggu kemudian;
 - Bahwa gambar yang terdakwa ambil pada saat korban tidur dan saat sementara mandi;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengupload foto korban ke jejaring sosial/internet;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 23 Maret 2012, menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;
1. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bructhalld Islamia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini Curve (warna putih) dengan No. imei: 3521970.04.292020.6 pin 223c6519 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card 0823465332777, dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) celana panjang jeans merk Lois No. 27, 1 (satu) buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan, dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta janji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:
 - Bahwa benar, terdakwa yang meng-upload foto bugil Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke jejaring sosial;
 - Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa;
 - Bahwa benar, awalnya terdakwa meng-upload kedua foto bugil Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dengan menggunakan Blackberry Gemini Curve (warna putih) dengan nomor imei: 361970.04.2920220.6;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah HP Blackberry Gemini Curve warna putih yang diakui sebagai miliknya sedangkan diperlihatkan foto diketahui bahwa itu adalah foto Jumriana Dg. Kanang;
 - Bahwa benar, sebabnya sehingga terdakwa meng-upload foto korban adalah karena pada saat terdakwa bertengkar,

korban Jumriana mengatakan bahwa terdakwa orang Bugis Sinjai yang tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar;
 - Bahwa foto yang di-upload terdakwa adalah benar foto yang diambil pada saat mereka berada di Kos Mulia Veteran Selatan Jl. Buludua No. 60 E Makassar;
 - Bahwa pada waktu terdakwa memotret, korban awalnya tidak keberatan nanti setelah terdakwa upload baru korban keberatan satu minggu kemudian;
 - Bahwa benar, gambar yang terdakwa ambil pada saat korban tidur dan saat sementara mandi;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk meng-upload foto korban ke jejaring sosial;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pada dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, dan oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.32 Wita, bertempat di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Jumria Dg. Kanang alias Isma Makassar membenarkan bahwa benar foto dirinya yang diupload oleh terdakwa ke facebook/jejaring sosial dalam keadaan bugil yang mana foto tersebut diambil oleh terdakwa pada saat korban dengan terdakwa berada di kost Mulia di jalan Veteran Selatan kamar 4c lantai 2 dan waktu itu korban sedang mandi tanpa busana. Bahwa waktu itu terdakwa mengambil gambar korban dengan menggunakan handphone Blackberry Curve 8520 warna putih, melalui akun facebook

Andry Bruchthalld Islamia di Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa terdakwa mengupload foto tersebut ke internet yang berakibat korban sangat malu karena nama baiknya tercemar;

- Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenaran yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terdakwa haruslah tetap dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;
- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Adapun amar putusan hakim dalam perkara pidana No.

21/Pid.B/PN.SUNGG ini adalah:

7. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalld Islamia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”**;

8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini Curve (warna putih) dengan No. imei: 3521970.04.292020.6 pin 223c6519 di dalamnya terdapat SIM Card 0823465332777, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) celana panjang jeans wana biru merk Lois No. 27, 1 (satu) buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar;
12. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Dalam pembuatan suatu putusan hakim memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan guna melahirkan putusan yang berpihak kepada yang benar. Hakim harus meyakini betul tentang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Saat wawancara pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, Ernawati Anwar, S. H. yang merupakan Hakim Anggota II dalam mengadili perkara tersebut menjelaskan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa diputus menyalahi Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah itu Majelis Hakim menimbang alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Ernawati Anwar, S. H., adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara antara lain adalah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- c. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Purwanto S. Abdullah juga mengungkapkan bahwa: (wawancara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013)

“majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum karena dalam pemeriksaan diketahui bahwa antara korban dan terdakwa masih suka sama suka dan mempunyai hubungan pacaran, malahan korban meminta terdakwa dibebaskan karena mereka akan dikawinkan. Kemungkinan saat peristiwa korban jengkel dan merasa malu sehingga melaporan terdakwa, tetapi setelah terprosesnya perkara ini antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban melakukan pendekatan dan berniat mengawinkan mereka. Namun, meskipun demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian majelis hakim melihat itu sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan”

Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Berpatokan pada uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana tersebut, penulis pada dasarnya menyetujui bahwa dengan adanya pernyataan damai antara pihak korban dengan pihak terdakwa dapat menjadi alasan hakim dalam meringankan pembedaan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Keinginan korban yang menginginkan terdakwa dibebaskan dengan adanya upaya damai tentu tidak dapat terjadi sebab terdakwa telah terbukti bersalah dan pemidanaan tersebut merupakan pembalasan dari perbuatannya yang dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terdakwa dan di pihak lain juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG dinilai penulis telah tepat. *Lex specialis derogat legi generali* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka penulis berpendapat bahwa UU ITE adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Pornografi dan KUHPidana yang merupakan *lex generalis* (hukum yang umum) pada delik pornografi melalui jejaring sosial/internet. Sebab dalam perkara ini, meskipun gambar yang diunggah oleh terdakwa merupakan wujud dari pornografi, namun harus dititikberatkan pada media atau sarana informasi dan transaksi elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa adalah jejaring sosial/internet dalam hal ini facebook.
2. Pertimbangan hukum hakim menurut penulis dalam perkara nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG yang menjatuhkan pidana lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum sudah tepat. Upaya

damai antara kedua belah pihak tidak dapat menghapuskan pembedaan terhadap terdakwa, sebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Penulis sependapat dengan hakim yang hanya menjadikan upaya damai antara korban dan terdakwa sebagai alasan yang meringankan pidana terhadap terdakwa, sebab pembedaan terhadap terdakwa merupakan pembalasan dari perbuatannya yang dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asas-asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil. Selain itu, dalam membuat surat dakwaan ataupun surat tuntutan, jaksa penuntut umum harus membuat dan menyusunnya secara teliti, jelas, dan cermat agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi vonis hakim.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur delik, juga Majelis Hakim

turut mempertimbangkan berat-ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan-keadaan pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Abdurrahman Nusantara. 2005. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah
- Andi Hamzah. 1987. *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bima Mulia.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1, Cetakan ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bismar Siregar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko Priyo Utomo dan Ali Akbar. 2011. *Step by Step Internet Marketing untuk Pemula*. Yogyakarta: MediKom.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Puslit Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Harjono. 2009. *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Andi publisher.

- Jarot S dan Sudarma S. 2012. *Buku Super Pintar Internet*. Jakarta: Mediakita.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M.H. Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusli Effendy. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Tjipta Lesmana. 1994. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Perundang-undangan:

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pranala luar:

<http://edukasi.kompas.com>, diakses pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013, pukul 12.53 Wita.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial), diakses pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, pukul 22.40 Wita).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, pukul 22.47 Wita.

<http://ronny-hukum.blogspot.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 17 September, pukul 08.17 Wita.

<http://hukumpedia.com>, diakses pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, pukul 23.25 Wita

<http://sutiatia.blogspot.com>, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, pukul 20.17 Wita.

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses pada hari Jumat, tanggal 15 November 2013, pukul 07.50 WITA

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 88 / AT / XII / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a : AYU ANITA SARI.
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 10 265
Jenis kelamin : Perempuan
Fakultas/Universitas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
A l a m a t : BTN. MUTIARA PERMAI BLOK J/1 No. 1 Gowa.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL/INTERNET** ". (Studi Kasus Perkara Pidana No. 21/PID.B/2013/PN. SUNGG) pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 09 Desember 2013.

PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

HERNAWATI, SH.
NIP. 19631231 198503 2 035

Tembusan :

- Arsip